

KEGIATAN DPR-RI AKHIR NOVEMBER 2011

Kegiatan minggu ini diawali dengan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus dan Badan-Badan, khususnya dalam pembahasan RUU. Berikut beberapa catatan kegiatan DPR-RI minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Sampai dengan akhir bulan November 2011, beberapa RUU yang rencananya akan segera memasuki Pembicaraan Tingkat II, belum jadi dilaksanakan karena ada beberapa alasan. Antara lain, Komisi III yang menangani RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih fokus kepada pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon pimpinan KPK. Adapun beberapa RUU lainnya yang memang direncanakan memasuki Pembicaraan Tingkat II akan dilaksanakan pada minggu-minggu kedepan sebelum penutupan masa sidang 16 desember 2011.

Satu RUU yang ditangani Komisi IV yaitu RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, masih ada satu bab yang belum ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, khususnya mengenai masalah Kelembagaan. Setelah melalui pembahasan, Kelembagaan ini menjadi Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kelembagaan yang berbentuk badan ini, masih akan dibahas kembali antara DPR dan Pemerintah, sehingga bab ini menjadi *pending matters*. Adapun bab-bab lain, pada umumnya sudah mendapatkan kesepakatan. RUU ini terdiri dari XII bab dan 177 pasal. Dalam RUU ini diatur mengenai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi, serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan berbagai komunitas lintas generasi. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan selama ini banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang canggih, dan telah



mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.

Komisi IV masih akan menangani 2 RUU lagi, yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Keduanya telah disetujui dalam Rapat Paripurna menjelang Penutupan Masa Sidang I menjadi RUU DPR

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Fungsi anggaran tidak ada penjadwalan khusus oleh Badan Anggaran DPR kecuali kegiatan rapat-rapat yang berkaitan dengan pendalaman atas APBN 2012, khususnya penerimaan negara. Adapun monitoring terhadap pelaksanaan APBN 2011 dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Untuk kegiatan pengawasan, beberapa Komisi telah melakukan kegiatan, antara lain Komisi I mengadakan rapat tertutup dengan BIN (Badan Intelijen Negara). UU mengamanatkan bahwa BIN pada hakekatnya adalah lembaga sipil. Terkait dengan hal ini, Komisi I meminta BIN agar menyusun Renstra dalam rangka mendukung paradigma pembangunan BIN sebagai lembaga sipil, serta agar BIN membangun paradigma baru yang sesuai dengan urgensi perkembangan lingkungan strategis yang ada dan proyeksi kepentingan nasional.

Komisi I juga melakukan Rapat Dengar Pendapat

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Umum (RDPU) dengan Dewan Adat Papua, Pemerintah Adat Papua, Presidium Dewan Papua, Tokoh Masyarakat Papua, Tokoh Agama Papua, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, Pelaku Sejarah Papua, Koalisi Mahasiswa Papua di Jakarta pada tanggal 23 November 2011. Beberapa catatan dari hasil RDPU ini antara lain: Komisi I segera mengagendakan Raker dengan Pemerintah c.q. Menkopolkukam dalam rangka menyelesaikan masalah Papua, Komisi I mendukung untuk diberikannya jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa Papua atas segala tindak ancaman, khususnya bagi mahasiswa Papua yang studi di luar Papua. Komisi I menyepakati perlu adanya dialog yang bermartabat dan bersahabat antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua, dimana dialog diprakarsai langsung oleh Presiden RI dan diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tanggal 30 November 2011. Dialog ini juga harus diawali dengan penciptaan prakondisi yang kondusif dengan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dan intimidasi yang berlangsung di Papua. Komisi I juga mendukung upaya untuk menghilangkan segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh semua pihak, khususnya oleh aparat TNI, Polri, dan aparat intelijen di Papua.

Dalam kaitan dengan masalah Papua, telah dilakukan Rapat Kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan sekaligus UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kegiatan ini berlangsung tanggal 25 November. Rapat Kerja ini dipimpin oleh wakil Ketua DPR Korpolkam dihadiri oleh jajaran Pemerintah, yaitu Mendagri, Menhan, Menkumham, Panglima TNI, Kapolri, Ka-BIN, Kepala UP4B, plt. Gubernur Papua, dan Plt Gubernur Papua Barat.

Dalam implementasi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan perkembangan terakhir Provinsi Papua dan Papua Barat, Wakil Ketua DPR Korpolkam mengatakan bahwa pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat terus berlangsung sesuai dengan kebijakan dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang mengacu pada 3 pilar, yaitu: [1] Papua tetap dalam NKRI, [2] pelaksanaan otonomi khusus sebagai wahana pembangunan Papua, dan [3] mengutamakan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk semakin mengoptimalkan pembangunan di Papua, Pemerintah membentuk UP4B yang diharapkan dapat berperan nyata dan efektif untuk memastikan bahwa koordinasi dan sinergisitas di tingkat Pusat dan Daerah dapat berjalan dengan baik. Serta memastikan program dan anggaran yang telah ditetapkan benar-benar tepat sasaran. Komunikasi konstruktif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua sudah berlangsung dengan cukup baik, namun dinamika politik dan keamanan yang selalu mendapat sorotan media massa cenderung menggambarkan seolah-olah tidak ada komunikasi konstruktif. Tidak bisa dipungkiri, bahwa masih ada gangguan keamanan di kedua provinsi ini yang tidak terlepas dari berbagai persoalan. Masyarakat Papua sebenarnya lebih menginginkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan, yang apabila ketiganya sudah terpenuhi, maka kepercayaan terhadap Pemerintah akan tumbuh dan berkembang guna terciptanya situasi yang *favourable* bagi pembangunan untuk kesejahteraan



masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan berlangsung pada 21 November 2011 dalam rangka persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan untuk: meningkatkan upaya terobosan didalam pelaksanaan Jampersal dan Jamkesmas; mengevaluasi pelaksanaan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan); mempersiapkan kebutuhan regulasi/pengaturan PP dan Peraturan Presiden sesuai dengan UU tentang SJSN dan UU tentang BPJS termasuk penyelesaian RPP tentang Badan Pengawas Rumah Sakit; mempersiapkan pelayanan kesehatan yang memadai (*benefit packages*, fasilitas kesehatan, termasuk penambahan tempat tidur kelas-3, standar pelayanan, jaringan pelayanan dan tenaga kesehatan).

Tim Pengawas Century telah melakukan rapat tanggal 23 November dengan BPK dengan agenda *progress report* terkait pelaksanaan *audit forensik* oleh BPK terkait kasus Bank Century. Dalam rapat ini, BPK menyampaikan perkembangan kelanjutan *audit forensik* yang merupakan kelanjutan dari audit investigasi BPK. Kesimpulan hasil rapat antara lain Tim Pengawas menugaskan Tim Kecil untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti *progress report* BPK atas *audit forensik* yang akan diselesaikan pada tanggal 23 Desember 2011 oleh BPK dengan jadwal tentatif, mengingat Tim Pengawas Century harus menyampaikan laporan kinerja tahun 2011 pada Rapat Bamus tanggal 8 Desember dan di Rapat Paripurna tanggal 13 atau 16 Desember 2011.

Kegiatan pengawasan lainnya, DPR akan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah dengan Jemaat GKI Taman Yasmin pada masa sidang ini atau masa sidang yang akan datang. Pertemuan ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara Pemkot Bogor dengan Jemaat GKI Taman Yasmin. Terkait pembangunan tempat peribadatan di Jalan Abdullah bin Nuh Kita Bogor. Rencana ini disampaikan pada pertemuan dengan perwakilan Jemaat GKI Taman Yasmin pada 29 November oleh Wakil Ketua Korinbang. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo.*

Capim KPK Dicecar Pertanyaan Tentang Harta

Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan daftar harta kekayaan dua calon pimpinan (capim) KPK Handoyo Sudrajat dan Abdullah Hehamahua. Dua kandidat yang masih memegang jabatan di KPK ini tercatat memiliki harta paling sedikit dibanding capim lainnya.

“Total kekayaan anda tercatat 360 juta rupiah, kenapa hanya segitu. Bapak boros atau bagaimana?” tanya anggota Komisi III dari Fraksi PAN Yahdil Abdi Harahap kepada Handoyo Sudrajat saat uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/11).

Yahdil memaparkan data yang diterimanya kandidat yang masih menjabat sebagai Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK ini memiliki kekayaan terdiri dari tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Timur sebesar Rp214.652.000, Giro setara kas sebesar Rp110.843.013, serta utang sebesar Rp250.000.000.

Menjawab hal ini Handoyo memaparkan hartanya memang hanya berjumlah sebanyak itu, berasal dari

penghasilannya sebagai akuntan pegawai negeri. “Saya sebagai akuntan, tapi saya pegawai negeri. Yah, itulah penghasilan saya selama ini. Saya baru bisa memperbaiki keadaan saya selama di KPK,” jelasnya. Ia menambahkan data kekayaan berupa aset tanah yang dimilikinya berdasarkan laporan tahun 2006, nilainya belum diperbaharui karena tidak ingin menjualnya.

Pada kesempatan berbeda, pertanyaan terkait harta juga disampaikan anggota Komisi III Ahmad Basyarah kepada capim KPK Abdullah Hehamahua yang melaporkan nilai kekayaannya Rp 460.529.427. Anggota Fraksi PDIP ini mengaku heran kenapa seluruh aset didaftarkan atas nama istrinya. “Seluruh aset atas nama istri saudara. Saya ingin tahu apa motifnya sehingga

penulisan aset atas nama istri?” tanyanya.

Abdullah Hehamahua yang menjabat penasehat KPK sejak tahun 2005 ini menjelaskan kejahatan korupsi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Baginya keadaan ini harus dihadapi seperti menghadapi perang dengan resiko kehilangan jiwa. “Korupsi sudah merupakan perang luar biasa, untuk melawannya saya memang siap untuk syahid. Kalau diberi amanat, saya akan mati dalam memberantas korupsi. Bukan mati di tempat tidur. Apakah ditembak, apakah dikerjain koruptor. Itu niat saya,” tegasnya.

Ia menambahkan, memperhatikan tantangan pekerjaan yang dihadapinya dalam perang melawan korupsi itulah sebabnya seluruh harta didaftarkan atas nama istrinya. “Semua harta saya atas nama istri saya karena saya tidak tahu kapan meninggal. Hanya mobil saja atas nama saya,” pungkas Abdullah. Penjelasan ini mendapat apresiasi tepuk tangan dari anggota Komisi III dan pemantau sidang yang berada di balkon. (iky) foto: iky/tim parle



Anggota komisi III DPR RI saat gelar sidang rapat uji kelayan dan kepatutan capim KPK

DPR RI - Situasi Papua Tidak Kondusif, Pemerintah harus jamin keamanan Papua

Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkhawatirkan situasi keamanan Papua, terjadi Penembakan misterius yang dilakukan oleh orang yang terlatih. Pemerintah diminta untuk segera melakukan tindakan tegas dan memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Papua.

Demikian dalam Rapat Kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dengan yang mewakili Pemerintah yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI. Dan hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Gubernur Papua dan Papua Barat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). di Gedung Nusantara DPR, Jum'at (25/11).

Proyo Budi Santoso mengatakan DPR ingin mendapatkan penjelasan mengenai situasi dan kondisi terakhir yang terjadi di Papua. DPR menilai kondisi dan situasi yang tidak kondusif dan tidak aman yang dirasakan masyarakat sipil Papua. "Perlu perhatian serius dalam membahas situasi Papua untuk menyelamatkan daerah yang juga merupakan wilayah NKRI, terjadi situasi dan kondisi yang terganggu, yang dinilai tidak kondusif dan tidak aman dirasakan masyarakat sipil Papua," katanya.

DPR RI menanyakan tindakan langkah-langkah Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Papua. Proyo menyampaikan terjadi penembakan misterius yang dilakukan oleh orang yang terlatih. Dia mengutarakan ada kekhawatiran penembakan dilakukan oleh oknum aparat, namun dengan tegas priyo mengatakan hal itu tidak mungkin. "kalau orang terlatih dari mana dan siapa?" katanya.

Priyo memberikan apresiasi yang



Susunan Rapat Kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2011 di Gedung DPR RI



Jajaran Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

telah dilakukan oleh TNI dan Polri, dalam penanganan dan langkah-langkah yang sabar dengan factor penindakan tegas dan tetap mendengarkan suasana yang terjadi. "Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Papua," katanya.

Dia juga menanyakan langkah Pemerintah mengenai kabar bahwa di Negara Belanda ada office atau toko yang memajang dan menjual simbol

OPM, "Bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian luar negeri dan menkopolkukham menindak lanjuti penanganannya," tambah Priyo.

Lebih lanjut Wakil ketua DPR Priyo juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai ada intervensi asing terhadap Indonesia dan kaitannya dengan keinginan Presiden Amerika Serikat Barack Obama membangun pangkalan militer di Darwin. (as) foto:as

Komisi VIII DPR Minta Kementerian PPPA Tingkatkan Sosialisasi PUG

Komisi VIII DPR memberikan catatan dan penekanan penting kepada Kementerian PPPA terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011 untuk segera ditindaklanjuti dengan peningkatan sosialisasi Pengurus Utamaan Gender (PUG) di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai upaya penyamaan pemahaman kesadaran gender melalui pelatihan perspektif gender dan anggaran responsif gender serta optimalisasi pemberdayaan komunitas perempuan.



Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA), Linda Amalia Sari Gumelar, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (29/11).

“DPR meminta juga kepada Kementerian PPPA perlu adanya peningkatan fungsi koordinasi lintas sektoral dalam kebijakan PPPA di kementerian/ lembaga lain untuk melakukan kerjasama terkait dalam penanganan tenaga kerja wanita, masalah fasilitas transportasi, anak jalanan dan lain-lain,” jelasnya.

Terkait dengan masalah korban

trafficking, Karding mengatakan, perlu penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) melalui koordinasi pusat dan daerah sebagai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang (trafficking). “Program perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban trafficking melalui gugus tugas anti trafficking,” tambahnya.

Untuk itu, jelas Karding, DPR meminta kepada Kementerian PPPA untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain, yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program dan

kebijakan, tuturnya.

Lebih jauh, Karding menjelaskan, Komisi VIII DPR memperjuangkan Kementerian PPPA agar dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tidak hanya pada kebijakan, monitoring dan evaluasi, tetapi bisa mengoperasionalkan program sebagaimana kementerian teknis lainnya, tutur Karding.

Menurutnya, perlu adanya penjelasan evaluasi pencapaian program dan kinerja berdasarkan program prioritas, serta satuan kerja dari Kementerian PPPA sehingga bisa terukur target pencapaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPPA, himbuhnya. (iw)/ foto:iw/parle.

Baleg Minta Masukan Akademisi Terkait RUU Daerah Kepulauan

Ke tiga para akademisi yang hadir pada Selasa (29/11) adalah MG. Lailosa, Cak Saimina dan I. Leatemia dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah.

RUU tentang Daerah Kepulauan termasuk salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011.

Sebelumnya, Baleg DPR telah mengadakan kunjungan kerja ke beberapa daerah kepulauan, salah satunya adalah ke Provinsi Maluku.

Beberapa masukan yang disampaikan saat pertemuan dengan Gubernur dan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan diantaranya adalah perlunya RUU ini disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. RUU ini diharapkan dapat menganulir/membatalkan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan RUU ini.

Masukan lain yang disampaikan, RUU ini harus mengatur secara tegas mengenai aturan mengenai pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan SDA migas.

Dalam RUU ini, perlu dicantumkan mengenai perlakuan kekhususan yang diatur, baik untuk infrastruktur maupun untuk pengelolaan energi. Hal ini yang menyebabkan Provinsi Kepulauan khususnya Provinsi Maluku mengalami kemiskinan khususnya kemiskinan struktural karena tidak memiliki aturan dan peraturan yang jelas mengatur mengenai hal itu.

Selain itu, pengaturan khusus lainnya yang perlu diatur yaitu terkait dengan pengelolaan dan penyediaan transportasi (transportasi darat, laut dan udara) dan komunikasi.

Masukan lainnya yang disampaikan adalah, argumentasi filosofis dalam naskah akademis menggambarkan prinsip keadilan, namun hal ini belum tergambar dalam draf RUU.

Sementara masukan yang disampaikan dari Universitas Pattimura dan Universitas Darusalam diantaranya

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang akademisi dari Universitas Pattimura Ambon, Maluku untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.



Para Akademisi MG. Lailosa, Cak Saimina dan I. Leatemia

adalah pandangan filosofis dalam naskah RUU ini perlu mempertimbangkan pandangan kearifan lokal.

RUU ini juga perlu mengatur kewenangan-kewenangan khusus dan pola pembangunan ideal perlu dilakukan pembangunan terbalik, didahulukan pembangunan di daerah minus baru dilakukan daerah yang kaya.

Keterlibatan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengatur hak partisipasi masyarakat, seperti hak untuk mengetahui, hak menyatakan pendapat, hak pengambilan keputusan dan hak pengawasan pembangunan.

Selain itu perlu diatur ketentuan penyelesaian sengketa, dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan pemerintahan dalam daerah-daerah kepulauan.

Menambahkan masukan-masukan yang telah disampaikan di Maluku, pada kesempatan kali ini, Lailosa mengatakan, menurutnya judul RUU ini cukup realistis bila ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan historisnya.

Dia meminta dalam RUU ini mengatur satu garis imajiner, prinsip

wawasan nusantara harus dijunjung tinggi.

Dia juga berpendapat, draft naskah RUU tentang Daerah Kepulauan ini mayoritas sudah cukup mengakomodir kepentingan daerah kepulauan. Namun, perlu penambahan-penambahan substantif berkenaan dengan kewenangan pengaturan SDA.

Dia menyambut baik pembahasan RUU ini, mengingat Provinsi Maluku termasuk provinsi nomor tiga termiskin di seluruh Indonesia.

Daerah kepulauan juga mempunyai karakteristik berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Luas daratan Maluku hanya 6,4% dan 93,6% wilayah laut. Di sini diperlukan pengaturan-pengaturan khusus karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi daerah kepulauan ini.

Sebagai contoh, pembangunan dapat terhenti hingga 6 sampai 7 bulan karena gelombang yang tinggi yang mengakibatkan kapal terhambat. Problem-problem yang terkait infrastruktur kelautan ini banyak menjadi kendala bagi daerah kepulauan. (tt) foto: tim parle

DPR Nilai Penyelenggaraan Ibadah Haji 2011 Belum Optimal

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa yang juga sebagai Tim Pengawas penyelenggaraan ibadah haji menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432 H/2011 kurang optimal, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairunnisa

“Masih terdapat kekurangan-kekurangan disana-sini,” ungkapnya saat ditemui tim Parle di Gedung Nusantara I DPR, Kamis (24/11).

Menurutnya, kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki adalah masalah pemondokan, transportasi, katering makanan, MCK, dan persoalan manajemen. Ia memberi contoh, seperti pemondokan kalau dilihat dari segi fisiknya sudah bagus, hanya ada pemadatan dipemondokan. “Pemondokan yang seharusnya di isi 6 orang tetapi di isi 8-10 orang dengan ukuran kamar 4 M². Jadi pemadatan dipemondokan itu masih terjadi walaupun dari segi fisik pemondokannya sudah bagus-bagus,” kata Chairunnisa.

Dia menambahkan, belum lagi ma-

salah tenda di Mina yang diisi oleh jemaah haji China dan Afrika, dimana seharusnya tenda jemaah haji Indonesia tidak ditempati oleh jemaah haji lain. “Ini ‘kan sudah jelas yang namanya tenda nomor 17 di Mina itu adalah tenda jemaah haji Indonesia, koq bisa jemaah haji lain mengisinya. Sedangkan jemaah haji kita malah keleleran di luar tenda,” ujarnya. Berarti panitia kita ini lemah, mestinya panitia kita itu harus bilang “ini tenda jemaah haji Indonesia tolong dong jangan diisi,” jelasnya.

Terkait dengan masalah katering makanan, Chairunnisa menjelaskan, sesungguhnya sudah ada kesepakatan di Pleno Komisi VIII DPR bahwa untuk Armina (Arafah dan Mina) ka-tering makanannya memakai boks, akan tetapi kenyataannya kemarin disana itu masih prasmanan, dimana dalam pengaturan prasmanan ini juga masih kurang baik. Karena para jemaah haji kita untuk mendapatkan makanan harus antri panjang dengan membawa piring kosong masing-masing yang makanannya diambilkan oleh petugas makanan. “Jadi tidak mengambil sendiri, inikan ironis sekali, semacam tahanan saja yang menunggu antri makanan,” tuturnya.

Chairunnisa lebih kecewa lagi saat melihat di Mina ada sekitar 200 orang jemaah haji Indonesia yang sakit Diare karena makanan (nasi) yang tersedia

itu makanan yang sudah basi. “Tapi sangat disayangkan pemerintah Indonesia oke-oke saja, tidak ada tindakan, itu ‘kan tidak benar juga,” jelasnya dengan nada kecewa.

Jadi masalah antri mengantre bukan hanya di katering makanan saja tapi di MCKnya juga begitu, mengantrenya sampai panjang. “Harusnya panitia komplain dong, wong kita bayar sama pemerintah Arab Saudi, bukannya tidak bayar. Kita harus komplain kalau kita mempunyai sebuah keinginan penyelenggaraan haji itu lebih baik dan melindungi jemaah haji kita, kasihan jemaah haji kita, masa dari zaman tahun kapan sampai tahun sekarang MCKnya tetap seperti itu terus,” sindirnya.

Menurutnya, itu memang urusan pemerintahan Arab Saudi, bukan urusannya pemerintah Indonesia, apalagi kita tidak mempunyai bargaining power dengan pemerintah Arab Saudi jadi posisi Indonesia lemah dimata Arab Saudi.

Persoalan Transportasi

Terkait transportasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, lanjutnya, DPR menyoroti persoalan transportasi yang seringkali telat melakukan antar jemput jemaah haji Indonesia. Yang dikatakan Taradudi yaitu pengangkutan jemaah haji dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina harusnya jemaah haji kita di Musdalifah itu setelah tengah malam (jam 12 malam) diberangkatkan ke Mina, tetapi sampai jam 12 malam lewat masih banyak jemaah haji kita yang belum terangkut. “Ini bagaimana bisa terjadi, jemaah haji kita ‘kan bayar Dam,” kata Chairunnisa seraya menambahkan memang agak repot karena sistemnya adalah sistem pemerintahan Arab Saudi dan bargaining power pemerintah Indonesia sangat lemah.

Menurutnya, kalau namanya Taradudi mestinya pemerintah Arab Saudi harus menyediakan kendaraan busnya lebih banyak sehingga para jamaah haji kita yang belum terangkut dapat terangkut, tidak ada lagi yang terbengkalai. Jadi kelemahan pemerintahan Indonesia sesungguhnya soal manajemen. Penyelenggaraan ibadah haji ini bukan hanya semata persoalan beribadah haji saja tetapi lebih daripada itu. Jadi manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus diperbaiki, tegasnya.

Pertama, jelasnya, adalah pemisahan regulator dengan operator. “Jadi

yang terjadi sekarang ini regulator pemerintah, operator pemerintah, semua oleh pemerintah,” kata Chairunnisa. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR akan merevisi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menurutnya, mau tidak mau UU Haji tersebut harus direvisi, karena undang-undang ini sudah tidak relevan lagi dimana regulasi dan operasi itu tetap oleh pemerintah, tambahannya. Kedua, lanjutnya, DPR mengusulkan segera dibentuk Badan Khusus Penyelenggaraan Ibadah Haji, kalau perlu Kementerian Khusus Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Wakaf seperti kementerian yang ada di Arab Saudi, yaitu Kementerian Haji dan Wakaf. “Komisi VIII DPR sudah sepakat untuk membentuk sebuah Badan,” katanya.

Dia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji ini belum maksimal karena masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tetapi memang masih ada kekurangan yang harus dievaluasi. “Jadi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan perlu perbaikan kedepannya,” imbuhnya. (iw)/foto:iw/parle.

Komisi I DPR RI Buka Akses Pengaduan Pencurian Pulsa

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima pengaduan dari masyarakat melalui email : www.panjapulsa@dpr.go.id, telepon 021-5715520 atau faks 021-5715523.

Untuk itu bagi masyarakat yang telah menjadi korban atau memiliki bukti terkait dengan kasus pencurian pulsa dapat melaporkannya, melalui sarana akses yang tersedia.

Langkah tersebut sehubungan dengan maraknya kasus pencurian pulsa yang diduga telah dilakukan oleh sejumlah content provider (CP) dan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi (PLJT) belum lama ini yang berdampak terjadinya keresahan public dan kerugian hingga milyaran rupiah. DPR RI melalui Komisi I membidangi informasi dan telekomunikasi, membentuk Panitia kerja (Panja) Pencurian Pulsa.

Pembentukan Panja sekaligus merupakan tindak lanjut setelah melakukan pembahasan terkait pencurian pulsa dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. “Komisi I DPR RI membentuk Panja untuk mendalami penanganan persoalan regulasi telekomunikasi dan praktik-praktik penipuan



Rapat Komisi I DPR untuk pembentukan panja pencurian pulsa

yang terjadi, serta perlindungan hak-hak konsumen telekomunikasi,” Jelas Ketua Harian Panja Tantowi Yahya (F-PG) dalam konpers, di Ruang kerja Komisi I, Selasa, (29/11).

Tujuan pembentukan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI adalah adalah

sebagai penataan ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler, sekaligus melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian berikut barang bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya. (parle) foto: tim parle

Ketua DPR RI

Minimnya Perlindungan Anak Di Indonesia

Dunia anak-anak adalah dunia dimana mereka belajar dan bermain. Namun pada kenyataannya, aktivitas anak-anak di Indonesia lebih banyak untuk bekerja.



Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Terkait dengan pekerja anak, data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan, ada sekitar 8,5 juta anak yang bekerja di berbagai bidang seperti pertambangan, jasa, jalanan, hingga pembantu rumah tangga. Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 2,1 juta di antaranya ternyata bekerja di dalam lingkungan buruk seperti di pertambangan atau terpapar bahan kimia pestisida perkebunan. Hal ini berarti banyak anak Indonesia yang dieksploitasi, terutama di tempat-tempat yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

Bahkan tindak kekerasan dari ta-

hun ke tahun ikut mewarnai dunia anak di Indonesia. Ratusan kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi setiap tahun dan cenderung meningkat. Data dari Nasional World Vision Indonesia menyebutkan, terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini dari 1.626 kasus pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.891 kasus pada tahun 2009, dari data 1.891 kasus pada 2009 tercatat sebanyak 891 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah.

Sementara itu data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menun-

jukkan, dalam empat bulan pertama di tahun 2011, telah terjadi 435 kasus kekerasan yang melibatkan anak. Hal yang menyedihkan, sebesar 58% dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut merupakan kekerasan seksual. Itu masih empat bulan pertama di tahun 2011. Sedangkan sepanjang tahun 2010, terdapat 2.339 laporan kekerasan terhadap anak dimana 62% merupakan kekerasan seksual. Dari laporan tersebut ternyata kekerasan yang terjadi kebanyakan dilakukan orang dekat korban. Lokasinya di rumah, sekolah, dan lingkungan pergaulan.

Peringatan Hari Anak Nasional setiap tahun hanya berupa acara-acara seremonial tapi minim tindakan yang konkrit dan membangun, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Fakta yang ada saat ini banyak Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), dan banyak anak-anak yang tinggal di jalanan dan belum mendapatkan kehidupan yang layak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, juga telah membawa pengaruh perubahan sosial yang mendasar kepada anak-anak yang berakibat kepada nilai dan perilaku anak. Perbuatan melanggar hukum sebagai akibat adanya kenakalan anak, karena 2 faktor utama. Yaitu, pertama, faktor pendidikan formal: tidak diberikannya pendidikan akhlak. Pendidikan hanya mengutamakan sisi intelektual, tetapi mengabaikan sisi emosional dan spiritual. Kedua, faktor diluar (non-formal), yaitu faktor lingkungan, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pergaulan yang lebih luas. Program hiburan kekerasan, berita kriminal, tayangan televisi atau sinetron yang tidak mendidik, waktu tayang yang tidak tepat, telah memberikan dam-

pak negatif terhadap anak, berpengaruh pada perilaku yang pada akhirnya anak melakukan perbuatan melanggar hukum. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah pengaruh negatif penggunaan narkoba, psikotropika serta zat adiktif semakin meningkat.

Kita mempunyai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita pun mempunyai Komisi Perlindungan Anak yang belum lama keanggotaannya telah ditetapkan oleh DPR RI. Tetapi perlindungan terhadap anak-anak Indonesia belum dilakukan secara signifikan oleh lembaga lembaga ini. Dalam kaitan perlindungan terhadap anak Indonesia inilah, DPR dan Pemerintah sekarang ini sedang membahas **RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**. RUU ini dimaksudkan sebagai pengganti **UU no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. UU no 3 Tahun 1997 ini belum secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan keputusan Presiden no 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* – konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa, anak wajib mendapat perlindungan demi masa depan mereka. Anak yang karena sesuatu hal harus menjalani proses peradilan terutama pada skala umur tertentu harus ditempatkan pada **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)** sebagaimana yang sedang dirumuskan dalam naskah RUU. Dengan UU ini perlu diatur agar proses peradilan kepada anak didasarkan kepada terciptanya keadilan atas dasar pendekatan yang memungkinkan anak yang menjalani proses peradilan nantinya dapat kembali kepada lingkungan sosial yang wajar, menghindari *stigmatisasi* terhadap anak yang telah berhadapan dengan hukum.

Pengadilan terhadap anak harus dapat disidangkan pada pengadilan



Anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah



Pidana Anak dilingkungan Peradilan Umum. Namun demikian harus diupayakan kalau bisa agar proses kasus-kasus anak diselesaikan terlebih dahulu di luar jalur pengadilan. Yaitu melalui *diversi* berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* dan pembimbingan kepada anak setelah menjalani

pidana. Oleh karena itu saya sangat mendukung agar RUU ini dapat segera diselesaikan, demikian pula masyarakat dan para pemangku kepentingan bagi proses penyelesaian RUU ini yang segera akan disetujui DPR untuk menjadi UU. (foto:internet)

Energi Merupakan Persoalan Kedaulatan Negara

Pimpinan DPR mengajak seluruh komponen bangsa meletakkan persoalan energi sebagai bentuk kedaulatan negara dengan merubah paradigma energi bukan sebagai pendapatan semata.



Peserta Seminar KEN

“Yang paling utama merubah paradigma mendasar kita dalam berpikir terkait persoalan energi saat ini ditempatkan semata-mata sebagai pendapatan nasional dalam APBN, Bukan kedaulatan energinya tetapi melihat persentasenya,”kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di hadapan peserta seminar KEN yang mengambil tema KEN Sebagai fondasi terwujudnya kedaulatan energi nasional sebagai kemandirian bangsa, di Gedung Pustakaloka, Senin, (28/11).

Menurut Pramono, Kedaulatan energi harus menjadi bagian dari kebijakan negara. Pram mencontohkan Korut, meskipun negaranya tertutup dan terkena embargo oleh AS dan sekutunya ternyata mereka bisa survive di bidang energi artinya bangsa Korut meletakkan energi sebagai kedaulatan negara. “Negara lainnya yaitu Kuba dengan penduduk sekitar 11.7 juta dan wisatawan 3 juta, mereka juga terkena embargo dan satu-satunya minyak diperoleh dari negara Venezu-

ela, bahkan harga minyaknya sama seperti Indonesia dan penduduknya merasa tidak kekurangan energi sama sekali,”paparnya.

Dia mengatakan, persoalan energi ini merupakan carry over sejak zaman Orba lalu, artinya omong kosong apabila kita ingin berdaulat tapi tidak merubah paradigma kita. “Kita harus menyadari bahwa energi merupakan kedaulatan bangsa. misalnya saja AS kebutuhan energi mereka sebesar 30 juta barel perhari namun tidak ada setetespun minyak diambil dinegaranya. Mereka mengambil dari luar negaranya. Artinya pertarungan kedepan adalah energi,”paparnya.

Bahkan, lanjut Pram, dirinya melihat persoalan konflik di Timteng tidak terlepas dari persoalan perebutan energi migas di Timteng antara AS dan Cina. “Jika terkait persoalan demokrasi maka tidak akan terjadi konflik tersebut,”katanya.

Yang kedua kebijakan energi nasional kita harus dirubah. Pembuat kebi-



Wakil Ketua DPR RI Pramono anung

jakan DPR dan pemerintah harus memikirkan energi dalam jangka panjang tanpa dipengaruhi kepentingan sesaat. “Negara kita negara demokrasi di dunia bahkan pemilu bisa 11 kali dan sangat liberal, orang yang duduk di ranah kebijakan jangan dibiarkan mengeluarkan cost yang besar dalam berdemokrasi yang berdampak mengedepankan kepentingan individu dan kelompoknya semata,”ujarnya.(si)/ foto:iw/parle

Komisi I DPR RI

Penandatanganan RUU Ratifikasi CTBT

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty-CTBT), Menteri Luar Negeri, hadir dalam mewakili kesempatan Pemerintah dengan DPR RI, di Gd. Nusantara II, Jakarta, Rabu (30/11).



Pengesahan RUU tentang pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir oleh Komisi I DPR

RUU tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, antara lain menyatakan bahwa atas dasar Pembukaan UUD 1945, dalam rangka tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir.

Indonesia berpandangan bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan

perlucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir.

Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia, sehingga resiko pecahnya perang nuklir menjadi keprihatinan internasional. Ancaman malapetaka nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia itu hanya dapat dihilangkan melalui penghapusan seluruh senjata nuklir.

Pemerintah RI telah menandatangani Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty di New York pada 24 September 1996. Atas dasar itulah maka DPR perlu mengesahkan Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty dalam bentuk RUU untuk disahkan menjadi UU. (as) foto: tim parle



Ketua komisi I DPR, Mahfud Siddiq

Komisi IV Dukung NTB Menjadi Lumbung Ternak

Komisi IV DPR RI mendukung provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi lumbung ternak nasional.



Wakil Ketua Komisi IV Anna Muawanah



Tim Komisi IV DPR saat meninjau salah satu peternakan yang ada di daerah NTB

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV Anna Muawanah selaku pimpinan rombongan Kunjungan Spesifik di sela-sela peninjauan kandang ternak sapi milik CV. Amanah di Kota Mataram Lombok, NTB (26/11). Anna mengatakan provinsi NTB sangat berpotensi mengingat populasi sapi yang semakin meningkat dan ditopang alamnya yang sangat mendukung bagi usaha peternakan.

“NTB sangat berpotensi menjadi lumbung ternak, meski saat ini populasi sapinya masih kalah jika dibandingkan dengan Jawa Timur,” ungkap Anna. Tapi dengan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait di NTB, tidak menutup kemungkinan populasinya bisa melebihi Jawa Timur.

Anggota Fraksi PKB DPR RI ini menambahkan, untuk mendukung program peternakan di NTB, pemerintah pusat telah menggulirkan sejumlah program bantuan, di antaranya dana Bansos. Anna mengatakan masih ada penyimpanan dalam penyaluran Bansos. “Untuk meningkatkan akun-

tabilitas dana Bansos perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus,” ujar Anna menyarankan. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah aspek kesehatan hewan dan kebersihan lingkungan, agar hewan-hewan ternak yang ada di NTB tidak terjangkit penyakit yang membahayakan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB, Dr. Ir. Syamsul Hidayat Dilaga, MS. Pada kesempatan tersebut menyatakan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi IV atas kunjungan ke NTB. Syamsul mengatakan anggota Komisi IV sangat kritis dalam melihat hal-hal detail seputar ternak. “Kami menyadari masih banyak kekurangan,” ungkap Syamsul. “Pepatah mengatakan tiada gadang yang tak retak, karena begitu banyak petani yang kami bina, sehingga masih banyak yang belum sempurna. Kami dari dinas peternakan dan kesehatan hewan akan terus memperbaiki kekurangan yang ada,” kata Syamsul berjanji.

Terkait program Sarjana Memba-

ngun Desa (SMD) yang dilaksanakan di provinsi NTB, Syamsul mengatakan keberhasilannya mencapai 80%. “Memang belum semua berhasil, ada satu-dua yang tidak berhasil, tetapi sebagian besar cukup berhasil,” kata Syamsul. Program SMD diterapkan dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Ketua Tim Komisi IV DPR Anna Muawanah berbeda pendapat mengenai SMD. Karena menurut pengamatannya banyak yang tidak berhasil. Untuk itu dirinya berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program SMD ini pada saat rapat dengan Kementerian terkait. “Kita akan evaluasi program SMD ini nanti saat rapat dengan menteri,” kata Anna.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke provinsi Nusa Tenggara Barat : Ketua Tim Anna Muawanah (F-PKB), dengan anggota : Sri Hidayati (F-PD), Adi Sukemi (F-PG), Habib Nabel Al-Musawwa (F- PKS), Akbar Zulfakar (F- PKS), Peggy Patricia Patippi (F-PKB). (Roy.Tvp) foto: roy.tvp / tim parle

DPR Minta Kepastian Yunus Husein Tetap Bertahan Walau Tidak Jadi Ketua KPK

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani meminta calon pimpinan (capim) KPK Yunus Husein menyampaikan pernyataan sikap yang tegas terhadap posisinya dalam proses uji kepatutan dan kelayakan.

Mantan Kepala PPATK tersebut perlu menegaskan hanya berminat jadi Ketua KPK saja atau apabila tidak terpilih siap menjadi anggota pimpinan KPK.

“Bapak ini ingin menjadi anggota pimpinan KPK atau ingin menjadi Ketua KPK. Sebab kalau tujuannya ingin menjadi Ketua kalau tidak terpilih nanti mundur. Ini sudah ada presedennya, yaitu Pak Jimly (Assidqi) atau Pak Muladi,” papar Ahmad Yani dalam uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/11).

Ia menyebut Jimly Assidqi telah dipilih DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi setelah gagal menjadi Ketua MK ia menyatakan mundur. Demikian pula Muladi yang telah diloloskan menjadi Hakim Agung, namun kemudian menyatakan mengundurkan diri karena tidak terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung.

Menjawab hal ini Yunus Husein menyatakan menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada anggota Komisi III. “Saya pernah dengar hadis nabi orang tidak boleh meminta jabatan. Jadi saya sendiri menyerahkan kepada anggota Komisi III mau dipilih sebagai apa silahkan saja. Saya siap dengan segala posisi yang ada,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Yunus Husein juga menjawab pertanyaan anggota Komisi III dari FPD Didi Irawadi Syamsudin yang menanyakan tentang wacana pembatasan transaksi tunai. “Saya pernah menulis surat, mengusulkan kepada pemerintah, Bank Indonesia dan DPR, sebelum Pak Marzuki Ali juga membuka wacana ini. Pembatasan transaksi tunai dapat mencegah praktik penyuapan yang marak terjadi,” imbuhnya. Di beberapa negara menurutnya seperti Belgia dan Perancis sudah mengatur transaksi dalam jumlah tertentu harus melalui perbankan, sehingga dapat dilacak.

Terkait usulan Ketua MK, Mahfud



Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (kanan)

MD untuk membangun kebun koruptor bagi terpidana korupsi, Yunus Husein menyebut ide itu beranjak dari upaya memberikan efek jera lewat rasa malu bagi para pelaku kejahatan luar biasa ini. “Salah satu prinsip pemberantasan korupsi adalah memberikan rasa malu bagi pelakunya. Saya lebih memilih memberi sanksi mereka kerja sosial dengan mengenakan seragam tertentu, ini sudah diterapkan di negara lain” usulnya.

Usul Penetapan Pimpinan KPK Dipercepat

Usai sidang fit and proper test hari ketiga, anggota Komisi III dari FPDIP Ahmad Basyarah mengusulkan agar penetapan pimpinan dan Ketua KPK dimajukan jadwalnya. “Bagaimana kalau jadwal penetapan pimpinan dan Ketua KPK dilakukan setelah fit and proper test hari terakhir (Kamis 1/12). Jadi langsung saja kita putuskan tidak usah menunggu besoknya seperti jadwal yang telah disusun,” paparnya.

Usulan ini mendapat dukungan dari beberapa peserta sidang. Tjatur Sapto Edi selaku pimpinan sidang menjelaskan masukan ini sudah pernah dibicara-

kan, namun terkendala waktu pimpinan KPK ‘terpilih’ Busyro Muqoddas, yang pada hari yang sama sudah mempunyai agenda lain dan telah menyiapkan waktu sesuai jadwal hari Jumat (2/12). Kehadiran Busyro menurutnya penting untuk menayakan kesediaannya untuk dipilih kembali menjadi Ketua KPK.

Anggota Komisi III dari FP3, Ahmad Yani berpandangan lain. “Pak Ketua, saya kira karena agenda kita bukan rapat kerja, ini adalah rangkaian fit and proper test, jadi kita tidak perlu persetujuan beliau (Busyro Muqoddas). Jadi pekerjaan kita bisa satu nafas, proses fit and proper dan putusan, tidak ada jeda waktu,” jelasnya. Beberapa anggota Komisi III lain nyeletuk bicara, “Biar nggak masuk angin, ketua.”

Pimpinan sidang akhirnya menyatakan usulan dapat diterima namun keputusan baru dapat diambil setelah Busyro Muqoddas dapat dihubungi kembali. “Ini sudah waktu maghrib ya, kita akan bicarakan usul ini dan kita usahakan mudah-mudahan Pak Busyro bisa sedikit kita paksa bisa datang. Jadi keputusan bagi semuanya besok pagi ya (Kamis 1/12). Setuju?” kata Tjatur sembari menyetokkan palunya. (iky) foto:tim parle

Komisi II Tinjau E-KTP di Pantura Jawa Barat

Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Taufiq Effendi (F-PD) melakukan peninjauan langsung proses pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di beberapa kecamatan di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat, yakni di Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Bekasi (28/11).

Saat pertemuan dengan bupati Indramayu Hj. Anna Shopenah beserta jajarannya, Ketua Tim Komisi II DPR Taufiq Effendi mengatakan, program e-KTP ini sangat strategis, karena diharapkan pada Pemilu tahun 2014 nanti tidak ada lagi permasalahan Data Pemilih Tetap (DPT), sehingga dapat dihasilkan Pemilu yang berkualitas dan kredibel, serta menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang dipercaya. “Begitu pentingnya e-KTP ini, DPR menyetujui anggaran 5,6 triliun rupiah,” tandasnya.

Mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menambahkan, soal e-KTP ini belum bisa dimasukkan ke dalam RUU tentang perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, karena Komisi II belum yakin apakah dapat selesai pada waktunya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, H. Harun Al-Rasyid mengaku pesimis target pencapaian e-KTP secara nasional pada akhir Desember 2011 dapat tercapai, mengingat banyak sekali permasalahan yang terjadi

di lapangan. “Kita prihatin kalau mitra kita Kemendagri gagal memenuhi target, meski Mendagri menyatakan akan mundur jika tidak mencapai target,” ucap Mantan Gubernur NTB ini.

Sementara Rahadi Zakaria (F-PDIP), Anggota Komisi II yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Purwakarta, Karawang, Bekasi) mengatakan dalam pelaksanaan e-KTP masih dijumpai masalah pada peralatan iris mata dan sidik jari. Peralatan pun datang terlambat, sehingga pelaksanaan baru bisa dimulai 10 november 2011, seharusnya sudah dimulai bulan Agustus 2011. “Banyak warga yang tidak tinggal di tempat karena bekerja di kota lain, bahkan banyak yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, ini juga jadi masalah,” ungkap Rahadi. “Meningkat banyaknya permasalahan di lapangan, maka proses e-KTP akan diperpanjang sampai bulan Mei 2012,” tambah Rahadi.

PNPM-Mandiri Pedesaan

Di samping meninjau pelaksanaan

e-KTP, Tim Komisi II juga melakukan peninjauan langsung beberapa proyek yang mendapat bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Ketua Tim Komisi II Taufiq Effendi mengatakan, salah satu yang perlu diketahui oleh Komisi II adalah bagaimana penentuan kriteria daerah yang menerima program PNPM. “Apakah sudah tepat sasaran? Kita juga tidak menghendaki kalau dibagi rata, karena tidak akan menjadi apa-apa,” ucap Taufiq. “Yang penting masyarakat diinformasikan secara transparan mengenai daerah mana yang mendapat bantuan,” tambahnya.

Lebih jauh Taufiq mengatakan, penunjukan PNPM itu harus menghasilkan snow ball effect atau efek bola salju. “Gulirannya makin lama makin besar, manfaatnya pun makin lama makin besar,” tegasnya. Dia mengungkapkan, PNPM ini sebenarnya meniru apa yang dilakukan peraih hadiah Nobel dari Bangladesh, Muhammad Yunus yang memberikan bantuan dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat.

Anggota Tim Komisi II yang berasal dari Indramayu Miryam S. Haryani (F-Hanura) mengatakan Kab. Indramayu pada tahun 2010 mendapat dana PNPM sebesar 1,5 milyar Rupiah. “Untuk tahun depan akan naik menjadi 3 milyar Rupiah,” ungkap Miryam.

Sekda Kab. Indramayu Cecep Suryana menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para anggota DPR yang telah memperjuangkan anggaran PNPM bagi Kab. Indramayu.

Selain mengunjungi Indramayu, Tim Komisi II DPR juga melakukan kunjungan ke Kab. Karawang dan Kab. Bekasi. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI, Ketua ; Taufiq Effendi (F-PD), Paula sinjal (F-PD), Nurul Arifin dan Agustina Basik-Basik (F-PG), Yasonna H. Laoly dan Rahadi Zakaria (F-PDIP), H. Aus Hidayat Nur (F-PKS), Fauzan Syai’e (F-PAN), H. Nu’man Abdul Hakim (F-PPP), Abdul Malik Haramain (F-PKB), H. Harun Al-Rasyid (F-Gerindra), dan Miryam S. Haryani (F-Hanura). (Bow.TvP) foto: tim parle



Tim Komisi II DPR melakukan peninjauan langsung proses pembuatan E-KTP di pantura, Jawa Barat

Sekjen DPR RI Lantik Pengurus P3S DPR RI 2011-2015

Sekjen DPR RI yang juga Pembina Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen DPR RI (P3S-DPR RI) Nining Indra Saleh menilai roda organisasi P3S-DPR RI berjalan sangat dinamis.



Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat berfoto bersama anggota P3S-DPR RI di Gedung DPR RI

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya partisipasi dari para anggota P3S-DPR RI untuk terlibat dalam kepengurusan P3S-DPR RI saat ini.

Hal itu disampaikan Nining Indra Saleh dalam acara serah terima kepengurusan P3S-DPR RI periode 2011-2015 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (02/12). Untuk saat ini kepengurusan P3S-DPR RI periode 2011-2015 diketuai oleh Toip Heriyanto mantan Deputy Bidang Administrasi DPR menggantikan Rehata Ketua P3S-DPR RI periode 2007-2011.

“Saya dengar banyak anggota (P3S-DPR RI) yang ‘berebut’ ingin jadi pengurus. Ini menandakan ada kecintaan pada organisasi ini (P3S-DPR RI). Kalau sudah ada kesamaan dan perhatian dari anggota organisasi, saya yakin organisasi ini akan terus berkembang dan bermanfaat bagi para anggotanya,” kata Nining.

Nining berharap program-program P3S-DPR RI periode lalu untuk dikembangkan pada periode saat ini, untuk

itu, pihaknya berjanji siap membantu organisasi P3S-DPR RI, terlebih kata Nining ke depannya tugas-tugas P3S-DPR RI sangatlah berat.

“Setjen DPR tetap akan memberikan bantuan. Bahkan saya sudah berkordinasi dengan Deputy Administrasi bagaimana membuat program-program paling tidak untuk kegiatan-kegiatan P3S-DPR RI,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Nining juga menyinggung soal kinerja P3S DPR-RI pada periode 2007-2011, ia melihat empat tahun kepengurusan P3S DPR-RI yang dipimpin Rehata berjalan dengan dinamis. Bahkan, dari sisi pencitraan organisasi ini sangatlah meningkat.

“Saya ikut bangga. Pak Rehata juga perintis Koperasi di Sekretariat Jenderal DPR. Alhamdulillah koperasi kita saat ini sudah termasuk sebagai koperasi berprestasi di tingkat nasional, ini adalah pondasi yang beliau (Rehata-red) tanamkan yang kita rawat dan kita kembangkan sampai saat ini,” katanya.

Di samping itu, menurut Nining,

kehadiran anggota P3S DPR-RI dalam forum ini, menggambarkan bahwa organisasi P3S-DPR RI sudah merasa dimiliki kembali oleh para anggotanya. “Saya berharap ada forum yang lebih luas lagi dalam organisasi ini,” demikian Nining Indra Saleh.

Sementara itu Ketua P3S-DPR RI periode 2011-2015 Toip Heriyanto berterima kasih kepada kepengurusan terdahulu yang dianggapnya banyak membantu menggerakkan roda organisasi P3S DPR-RI sehingga organisasi ini semakin dikenal serta banyak anggota yang berminat masuk kedalam kepengurusannya. “Saya mengibaratkan P3S-DPR RI ibarat ‘gadis yang seksi’, karena banyak yang berapresiasi dan tertarik ingin menjadi pengurus,” jelasnya.

Meski begitu, kata dia, pengurus tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang, menurut Toip, yang terpenting adalah bagaimana bersama-sama membangun P3S-DPR RI untuk kedepannya. (nt) foto:tim parle

Komisi Perhubungan Minta Basarnas Lakukan Perencanaan Program 2012 Lebih Baik

Komisi V DPR RI meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) melakukan persiapan dan perencanaan yang lebih baik khususnya terhadap program/kegiatan Tahun 2012 yang merupakan program/kegiatan lanjutan dari Tahun 2011 agar dapat terserap pada akhir Tahun anggaran.



Wakil Ketua Komisi V DPR, Nursyirwan Sujono

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Nursyirwan Sujono saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas, Rabu (30/11) di gedung DPR.

Dalam kesimpulan yang lain Nursyirwan kembali menyampaikan, Komisi V DPR RI memahami capaian realisasi anggaran Basarnas yang hingga 31 Oktober 2011 tercatat sebesar 70,29%, namun Komisi V DPR prihatin terkait capaian realisasi anggaran BMKG yang hingga November 2011 tercatat baru sebesar 52,52%.

Untuk itu, Komisi V DPR meminta meningkatkan capaian serapan mencapai sebesar 97% (BMKG) dan 80%

(Basarnas) baik realisasi fisik maupun keuangan, dengan segera menyelesaikan berbagai penyebab rendahnya serapan anggaran.

Rapat Dengar Pendapat pagi itu khusus mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR mengapresiasi hasil audit BPK tahun 2010 terhadap BMKG yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.

Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono mengatakan, pagu anggaran BMKG tahun 2011 paska revisi penghematan program generik sebesar lebih kurang Rp 1 triliun.. Sesuai dengan prioritas Nasional (2009-2014), program BMKG

diprioritaskan untuk pembangunan Pos Agroklimat di 11 provinsi lumbung padi nasional dan Sekolah Lapang Iklim.

Selain itu, untuk penjaminan berjalannya fungsi sistem peringatan dini tsunami (TEWS) dan sistem peringatan dini cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya serta sistem peringatan dini iklim (CEWS) pada 2013.

Saat ini serapan yang dicapai sebesar 52,52 %. Kegiatan yang telah dilelang sampai dengan 31 Oktober 2011 mencapai 95% dan status masih dalam proses pelaksanaan. "Diperkirakan penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2011 mencapai 97 persen," kata Woro.

Sementara Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland mengatakan, tahun anggaran 2011 Basarnas mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,32 triliun. Sampai dengan 31 Oktober 2011, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 809.06 miliar atau realisasi keuangan 70,29%, realisasi fisik sebesar 75,73%.

Max menyampaikan, tahun anggaran 2011 ini terdapat beberapa permasalahan kegiatan yaitu kegiatan pengadaan kapal penyelamat 40 M sebesar Rp 40,50 miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak memungkinkan dapat selesai di tahun 2011.

Hal ini disebabkan, karena usulan revisi pengadaan kapal dari 40 M ke 59 M melalui multiyears tidak disetujui Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, Basarnas memutuskan untuk menunda kegiatan tersebut ke tahun 2012 melalui Surat Kepala Badan SAR Nomor SP 102/1/1632-BSN tentang penundaan kegiatan pengadaan kapal SAR yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.

Sementara untuk temuan BPK, menurut Max, semua hasil temuan telah ditindaklanjuti dan sudah diselesaikan.(tt) foto:tim parle

Pendidikan Salah Satu Cara Pengentasan Kemiskinan

Ketua DPR RI, Marzuki Alie membuka Diskusi Panel Millenium Development Goals (MDGs) and Eradication of Poverty yang diadakan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) di Operation Room, Gedung Nusantara, Jum'at (25/11).

Dalam pidato pembukaannya tersebut, Marzuki mengatakan, bahwa salah satu hal yang terpenting untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan peningkatan pendidikan. “Masalah pendidikan memegang peran utama dan itu harus menjadi faktor utama yang mendapatkan perhatian dari kita semua sebagai salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Diskusi Panel yang mengangkat tema mengenai MDGs dan penghapusan kemiskinan tersebut disambut baik oleh para peserta yang hadir. Dalam pidato pembukaannya, Marzuki mengatakan Sampai dengan awal tahun 2011, Indonesia telah mencapai sebagian dari beberapa target MDGs, yaitu target MDGs pertama dalam hal mengurangi jumlah penduduk yang masih memiliki pendapatan per kapita dibawah US\$1, selanjutnya target MDGs 3 dalam hal meningkatkan kesetaraan gender di semua jenis dan jenjang pendidikan yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki, serta target MDGs 6 yaitu menurunkan prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk.

“Walaupun kinerja pencapaian MDGs tingkat nasional sudah cukup baik, tetapi ada beberapa tujuan yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2015,” jelasnya.

Marzuki menambahkan, bahwa saat ini masih terlihat adanya disparitas kinerja di provinsi, kabupaten, dan kota dalam mencapai target MDGs. Menurutnya, peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta peran aktif masyarakat untuk menangani disparitas kinerja juga perlu ditingkatkan

“Ini menuntut kerja sama lintas sektor dan lintas bidang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,



Ketua DPR RI MARzuki Alie saat menyampaikan Pidato pada acara Diskusi Panel Millenium Development Goals (MDGs)



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat berjabat tangan dengan Director General UNESCO Ms. Irina Bokova

agar sluruh pemangku kepentingan dapat turut andil. Karena MDGS bukan semata-mata untuk memenuhi komitmen internasional tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, dihadiri pula oleh Director General UNESCO, Ms.

Irina Bokova, Resident Coordinator of United Nations in Indonesia, Mr. El-Mostafa Benlamih, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Muhammad Nuh, Asisten Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, Diah S. Samiarsih, dan Special Envoy for Poverty Alleviation, Dr. HS Dillon. (ra) foto:tim parle

Mari



Bersama

Kita Sukseskan

Parlemen Remaja 2011

Tingkat Mahasiswa se-Indonesia

2-6 Desember 2011

Parlemen Remaja 2011

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
dan Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id / www.pengaduan.dpr.go.id